

Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo

Sofyan Alhadar¹, Andi Yusuf Katili², Agus Pariono³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

alhadsof21@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com², guspri811@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan perlindungan sosial merupakan instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah masyarakat penerima manfaat program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo, dengan sampel sebanyak 386 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,05. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai t hitung sebesar 13,154 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,310 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial memberikan kontribusi sebesar 31% terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, semakin efektif implementasi kebijakan perlindungan sosial, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of social protection policies in improving community welfare in Gorontalo Regency. Social protection policies are important instruments for reducing poverty, increasing access to basic services, and strengthening the socio-economic resilience of communities. This research employed a quantitative

approach using a survey method. The population consisted of beneficiaries of social protection programs in Gorontalo Regency, with a sample of 386 respondents determined using the Slovin formula. Data were collected through questionnaires, observations, and documentation. Data analysis was conducted using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, simple linear regression, t-tests, and the coefficient of determination (R^2) with the assistance of SPSS software. The results indicate that the effectiveness of social protection policies is categorized as high, with a mean score of 4.12, while community welfare is also categorized as high, with a mean score of 4.05. Regression analysis revealed that the effectiveness of social protection policies has a positive and significant effect on community welfare, with a t-value of 13.154 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination (R^2) value of 0.310 indicates that social protection policy effectiveness contributes 31% to the improvement of community welfare. Therefore, the more effective the implementation of social protection policies, the higher the level of community welfare in Gorontalo Regency.

Keywords: *Policy Effectiveness, Social Protection, Community Welfare, Public Policy*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara melalui berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, kerentanan ekonomi, ketimpangan sosial, serta berbagai bentuk ketidakpastian yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perlindungan sosial menjadi perhatian utama berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan struktur ekonomi, meningkatnya kesenjangan sosial, dinamika pasar tenaga kerja, serta berbagai krisis global telah mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Perlindungan sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan sosial bagi kelompok miskin, melainkan

sebagai investasi sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai risiko kehidupan. Menurut berbagai kajian internasional, sistem perlindungan sosial yang efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Di Indonesia, implementasi kebijakan perlindungan sosial diwujudkan melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sosial tunai, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai bentuk subsidi dan bantuan lainnya. Berbagai program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah terus berupaya memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih ditemukan dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterbatasan data sosial ekonomi, tumpang tindih program, rendahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas implementasi, akurasi data penerima manfaat, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Perlindungan sosial memiliki hubungan yang erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, serta berbagai layanan publik lainnya. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial menjadi instrumen penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa bantuan sosial yang dirancang secara tepat sasaran dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga konsumsi rumah tangga, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah di Provinsi Gorontalo juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024 mencapai 16,43 persen atau sekitar 61,91 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan tersebut masih tergolong cukup tinggi dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain persoalan kemiskinan, indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan perhatian serius, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan, dan tingkat pengeluaran rumah tangga. Berbagai indikator tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Kabupaten Gorontalo perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan konsep yang multidimensional. Tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, kualitas lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, analisis efektivitas kebijakan perlindungan sosial perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator kesejahteraan yang relevan. Pendekatan multidimensional ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan

target yang direncanakan. Dalam konteks perlindungan sosial, efektivitas dapat diukur melalui ketepatan sasaran penerima manfaat, peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga, penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, pengukuran efektivitas kebijakan perlindungan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pentingnya evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan sosial semakin relevan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kesejahteraan sosial setiap tahunnya. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien harus mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah.

Di sisi lain, berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Inflasi, perubahan struktur pasar kerja, dampak digitalisasi ekonomi, serta ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan kerentanan kelompok berpenghasilan rendah. Dalam situasi seperti ini, keberadaan sistem perlindungan sosial yang kuat menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko kemiskinan yang lebih luas.

Namun demikian, efektivitas kebijakan perlindungan sosial tidak dapat diasumsikan secara otomatis hanya berdasarkan keberadaan program atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Diperlukan bukti empiris yang menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang berfokus pada analisis efektivitas kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi kebijakan di tingkat lokal yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan daerah lainnya.

KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta menghasilkan dampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses perumusannya, tetapi juga oleh implementasi dan evaluasinya.

Teori Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas merupakan konsep penting dalam evaluasi kebijakan publik. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin efektif suatu kebijakan.

Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi diukur berdasarkan kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan pada kelompok sasaran.

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian kebijakan adalah teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh W. Jack Duncan. Duncan menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Pencapaian tujuan menunjukkan sejauh mana program atau kebijakan mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan sosial, indikator ini dapat dilihat dari keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses layanan sosial, serta memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.

2. Integrasi (Integration)

Integrasi berkaitan dengan kemampuan organisasi atau institusi dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

3. Adaptasi (Adaptation)

Adaptasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo melalui analisis pencapaian tujuan program, koordinasi antaraktor pelaksana, dan kemampuan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial (*social protection*) merupakan konsep yang berkembang sebagai instrumen negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi. Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization mendefinisikan perlindungan sosial sebagai seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi serta mencegah kemiskinan, kerentanan, dan eksklusi sosial melalui jaminan pendapatan dasar serta akses terhadap layanan kesehatan dan sosial yang esensial.

Konsep perlindungan sosial menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan, seperti kemiskinan, sakit, pengangguran, disabilitas, maupun usia lanjut. Perlindungan sosial juga dipandang sebagai investasi sosial yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Menurut rekomendasi ILO mengenai *Social Protection Floors*, sistem perlindungan sosial harus menjamin empat aspek utama, yaitu: 1. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar; 2. Jaminan pendapatan bagi anak-anak; 3. Jaminan pendapatan bagi penduduk usia produktif yang tidak mampu bekerja; 4. Jaminan pendapatan bagi lanjut usia.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan sosial diwujudkan melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sosial tunai, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak, berkembang, dan melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.

Konsep kesejahteraan sosial tidak hanya diukur melalui tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial bersifat multidimensional.

Menurut pendekatan pembangunan manusia (*human development approach*), kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui: 1. Tingkat pendapatan dan daya beli Masyarakat; 2. Akses terhadap Pendidikan; 3. Akses terhadap pelayanan Kesehatan; 4. Kesempatan kerja dan produktivitas; 5. Kualitas perumahan dan lingkungan; 6. Partisipasi sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan serta memiliki akses yang setara terhadap berbagai sumber daya pembangunan.

Hubungan Perlindungan Sosial dengan Kesejahteraan Masyarakat

Secara teoritis, perlindungan sosial memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Teori *Social Risk Management* yang dikembangkan oleh Robert Holzmann dan Steen Jorgensen menjelaskan bahwa perlindungan sosial membantu masyarakat menghadapi berbagai risiko melalui strategi pencegahan (*prevention*), mitigasi (*mitigation*), dan penanggulangan (*coping*). Dengan adanya perlindungan sosial, rumah tangga miskin memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mempertahankan konsumsi, mengakses layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam perspektif pembangunan, perlindungan sosial memberikan beberapa manfaat, yaitu: 1. Mengurangi tingkat kemiskinan; 2. Menurunkan ketimpangan sosial; 3. Meningkatkan akses Pendidikan; 4. Meningkatkan akses Kesehatan; 5. Memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga; 6. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, semakin efektif pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, semakin besar peluang terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas kebijakan perlindungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo melalui pengukuran variabel yang dapat dianalisis secara statistik.

Menurut Creswell (2022), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji teori objektif dengan meneliti hubungan antarvariabel melalui instrumen penelitian dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan perlindungan sosial diposisikan sebagai variabel independen (X), sedangkan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen (Y).

Metode survei digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden yang menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian, Januari hingga Mei 2026.

Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi perhatian peneliti (Sugiyono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima manfaat program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo, yang meliputi penerima: 1. Program Keluarga Harapan (PKH); 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 3. Jaminan Kesehatan Nasional PBI; 4. Program bantuan sosial lainnya

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun terakhir terdapat sekitar 10.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sampel

Karena jumlah populasi cukup besar, maka penelitian menggunakan teknik sampling.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N^2 e^2}{1 + N e^2} \quad n = 1 + \frac{N^2 e^2}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = tingkat kesalahan (5%)

Apabila:

$$N = 10.500$$

$$e = 0,05$$

Maka:

$$n = 10.500 / (1 + 10.500 \times 0,0025)$$

$$n = 385,8$$

Dibulatkan menjadi 386 responden.

Teknik sampling yang digunakan adalah Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini dipilih karena populasi terdiri atas beberapa kelompok penerima program perlindungan sosial yang berbeda sehingga setiap kelompok memperoleh kesempatan yang proporsional untuk menjadi sampel penelitian.

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial.

Kriteria:

- $\text{Sig} < 0,05$ = Berpengaruh signifikan
- $\text{Sig} > 0,05$ = Tidak berpengaruh signifikan

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi efektivitas kebijakan perlindungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai R^2 berada pada rentang: $0 \leq R^2 \leq 1$

Semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model menjelaskan variabel dependen semakin kuat.

Hipotesis Penelitian

H₁: Efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

H₀: Efektivitas kebijakan perlindungan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah sekitar 2.125 km² dan terdiri atas 19 kecamatan. Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara aktif melaksanakan berbagai program perlindungan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-PBI), Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai bantuan sosial lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masih terdapat tantangan berupa kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan sosial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan sosial menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program-program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 386 orang yang merupakan penerima manfaat program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	156	40,4
Perempuan	230	59,6
Total	386	100

Sumber: olahan peneliti 2026

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20–30 Tahun	62	16,1
31–40 Tahun	103	26,7
41–50 Tahun	121	31,3
>50 Tahun	100	25,9
Total	386	100

Sumber: olahan peneliti 2026

Data menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada kelompok usia produktif 41–50 tahun sebanyak 31,3%.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap seluruh item pernyataan menggunakan Pearson Product Moment dengan jumlah responden uji coba sebanyak 30 orang. Nilai r tabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 0,361.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial (X)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1	0,741	0,361	Valid
X2	0,776	0,361	Valid
X3	0,715	0,361	Valid
X4	0,812	0,361	Valid
X5	0,768	0,361	Valid
X6	0,736	0,361	Valid

Sumber: olahan peneliti 2026

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y1	0,725	0,361	Valid
Y2	0,781	0,361	Valid
Y3	0,752	0,361	Valid
Y4	0,813	0,361	Valid

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y5	0,798	0,361	Valid
Y6	0,772	0,361	Valid

Sumber: olahan peneliti 2026

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial (X)	0,882	0,70	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,891	0,70	Reliabel

Sumber: olahan peneliti 2026

Berdasarkan hasil tersebut, nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Kategori
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial	4,12	0,56	Tinggi
Kesejahteraan Masyarakat	4,05	0,61	Tinggi

Sumber: olahan peneliti 2026

Nilai rata-rata variabel efektivitas kebijakan perlindungan sosial sebesar 4,12 menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial telah berjalan dengan baik. Sementara itu, rata-rata kesejahteraan masyarakat sebesar 4,05 menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Sig.
Residual	0,200

Sumber: olahan peneliti 2026

Karena nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig. Deviation from Linearity
X terhadap Y	0,127

Sumber: olahan peneliti 2026

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektivitas kebijakan perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.

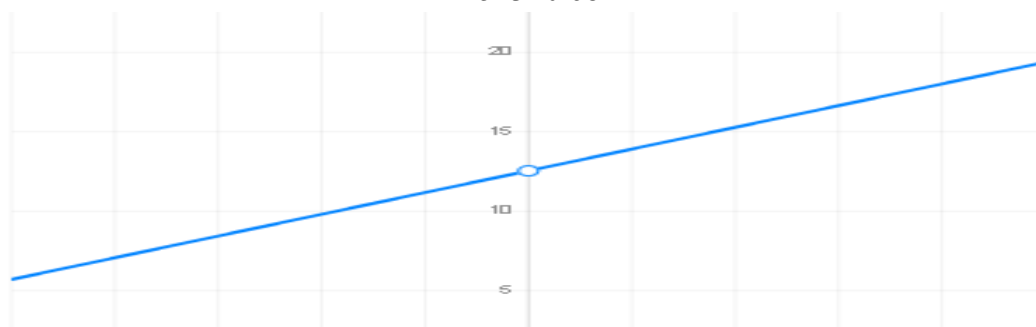
Tabel 9. Hasil Regresi Linear Sederhana

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	12,543	1,872	6,700	0,000
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial	0,684	0,052	13,154	0,000

Sumber: olahan peneliti 2026

Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan:

$$Y=12.543+0.684X$$



Interpretasi:

1. Nilai konstanta sebesar 12,543 menunjukkan bahwa apabila efektivitas kebijakan perlindungan sosial dianggap konstan, maka nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 12,543.
2. Koefisien regresi sebesar 0,684 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas kebijakan perlindungan sosial akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,684 satuan.

Uji Hipotesis (Uji t)**Tabel 10. Hasil Uji t**

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial	13,154	1,966	0,000

Sumber: olahan peneliti 2026

Berdasarkan hasil pengujian:

- t hitung = 13,154
- t tabel = 1,966
- Sig = 0,000

Karena:

- t hitung > t tabel
- Sig < 0,05

Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Artinya efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 11. Model Summary**

R	R Square	Adjusted R Square
0,557	0,310	0,308

Sumber: olahan peneliti 2026

Nilai R Square sebesar 0,310 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial mampu menjelaskan variasi kesejahteraan masyarakat sebesar 31,0%.

Sementara itu, sebesar 69,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti: 1. Pendapatan keluarga; 2 Kesempatan kerja; 3. Tingkat Pendidikan; 4. Kondisi Kesehatan; 5. Infrastruktur daerah; 6. Faktor ekonomi lainnya

Pembahasan**Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial di Kabupaten Gorontalo**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,12. Temuan ini

menunjukkan bahwa program-program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah telah mampu mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari indikator pencapaian tujuan, mayoritas responden menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Program seperti PKH dan BPNT memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Pada indikator integrasi, koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat dinilai cukup baik sehingga proses penyaluran bantuan berjalan relatif lancar. Sementara pada indikator adaptasi, program perlindungan sosial dinilai cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pasca berbagai tekanan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas Duncan yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh pencapaian tujuan, integrasi antaraktor, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,05.

Peningkatan kesejahteraan terlihat dari: 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan; 2. Meningkatnya akses layanan kesehatan melalui JKN; 2. Meningkatnya akses pendidikan anak penerima bantuan; 3. Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga.

Meskipun demikian, beberapa responden masih mengeluhkan keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan yang menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan.

Pengaruh Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini mendukung teori *Social Risk Management* dari Holzmann dan Jørgensen yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ketika program perlindungan sosial dilaksanakan secara efektif, masyarakat

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan kualitas hidup.

Hasil penelitian juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa program perlindungan sosial mampu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dengan demikian, semakin efektif pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan utama:

1. Efektivitas kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo berada pada kategori tinggi.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat berada pada kategori tinggi.
3. Efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Kontribusi efektivitas kebijakan perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 31%.
5. Faktor lain di luar kebijakan perlindungan sosial masih berperan cukup besar dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan hasil tersebut, kebijakan perlindungan sosial terbukti menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo dan perlu terus diperkuat melalui peningkatan ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, dan integrasi program antarinstansi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-PBI), dan berbagai program bantuan sosial lainnya telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata variabel efektivitas kebijakan perlindungan sosial sebesar 4,12 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, program perlindungan sosial dinilai mampu membantu masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan dasar, meningkatkan akses terhadap layanan sosial, serta memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi yang dihadapi masyarakat. Koordinasi antarinstansi pelaksana juga dinilai cukup baik sehingga mendukung kelancaran implementasi program di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,05.

Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga. Program perlindungan sosial juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat sehingga mereka lebih mampu menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Hal ini dibuktikan oleh:

- Nilai t hitung sebesar 13,154 yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,966.
- Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,310 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial mampu menjelaskan variasi kesejahteraan masyarakat sebesar 31%.

Sementara itu, sisanya sebesar 69% dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti: 1. Tingkat pendidikan Masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Pendapatan rumah tangga; 4. Kondisi kesehatan; 5. Infrastruktur public; 6. Pertumbuhan ekonomi daerah; 7. Akses terhadap modal usaha dan sumber daya produktif lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial melalui perbaikan sistem pendataan penerima manfaat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program perlindungan sosial guna mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pendamping sosial dan petugas lapangan, juga perlu dilakukan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat perlu terus melakukan penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial melalui integrasi data kesejahteraan sosial nasional sehingga dapat meminimalkan kesalahan data penerima manfaat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar perlindungan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik melalui peningkatan pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan kesehatan, maupun pengembangan usaha ekonomi rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, T., & Frohlich, K. L. (2016). Capitals and capabilities: Linking structure and agency to reduce health inequalities. *Social Science & Medicine*, 74(2), 236–244. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.10.028>
- Alderman, H., Gentilini, U., & Yemtsov, R. (2018). *The 1.5 billion people question: Food, vouchers, or cash transfers?* World Bank Publications.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2024). *Kabupaten Gorontalo dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2024). *Statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Gorontalo 2024*. BPS Kabupaten Gorontalo.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2024). *Provinsi Gorontalo dalam angka 2024*. BPS Provinsi Gorontalo.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2019). *The impact of cash transfers: A review of the evidence from low- and middle-income countries*. *Journal of Social Policy*, 48(3), 569–594. <https://doi.org/10.1017/S0047279418000627>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2020). Transformative social protection. *IDS Working Papers*, 2020(232), 1–26. <https://doi.org/10.19088/IDS.2020.232>
- Gentilini, U., Almenfi, M., Dale, P., Blomquist, J., Natarajan, H., & Desai, V. (2022). *Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review of country measures*. World Bank.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate data analysis* (9th ed.). Cengage Learning.
- Handayani, S., Nurwati, N., & Budiarti, M. (2021). Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–156.
- Hickey, S., Lavers, T., Niño-Zarazúa, M., & Seekings, J. (2020). The negotiated politics of social protection in East and Southern Africa. *Oxford Development Studies*, 48(4), 341–356. <https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1735166>
- International Labour Organization. (2021). *World social protection report 2020–2022: Social protection at the crossroads*. International Labour Office.
- International Labour Organization. (2024). *World employment and social outlook: Trends 2024*. International Labour Office.
- Kabeer, N. (2018). Gender, livelihood capabilities and women's economic empowerment. *Review of Social Economy*, 76(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/00346764.2017.1386701>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan kebijakan perlindungan sosial Indonesia*. Kementerian Sosial RI.
- Kidd, S., Gelders, B., & Bailey-Athias, D. (2017). Exclusion by design: An assessment of the effectiveness of the proxy means test poverty targeting mechanism. *International Social Security Review*, 70(4), 1–30. <https://doi.org/10.1111/issr.12148>
- Leisering, L. (2019). The global rise of social cash transfers. *Global Social Policy*, 19(1–2), 3–24. <https://doi.org/10.1177/1468018119842125>
- Midgley, J., & Tang, K. L. (2022). Social policy and social development. *International Journal of Social Welfare*, 31(1), 4–16. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12481>
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan manajemen politik kebijakan publik* (7th ed.). Elex Media Komputindo.
- Pratama, R., & Kurniawan, T. (2022). Analisis efektivitas bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45–58.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 221–234.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sumarto, S., & Bazzi, S. (2019). Social protection in Indonesia: Past experiences and future directions. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 321–347. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1694246>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.
- World Bank. (2022). *Social protection for recovery: Realizing Indonesia's vision for a resilient and inclusive social protection system*. World Bank.